

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah pondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana publik pendidikan, termasuk perbaikan pada sektor Pendidikan dan Kesehatan. Mawarni et al, (2013). Pembangunan ekonomi dalam suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan manfaatnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wiranto et al (2020). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Peningkatan kegiatan perekonomian harus didukung dari sisi pendanaan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan (Manulusi et al., 2021).

Pertumbuhan pendapatan per kapita yang dari tahun ke tahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi, di mana pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan an yang diterima di sektor-sektor yang berdampak pada berputarnya ekonomian daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi akan memberikan



sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak yang akan digunakan daerah untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Yuniarti, (2008), dalam Wiranto et al (2020).

Selain itu, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur melalui pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Masyarakat yang memiliki proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi biasanya memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, serta kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan sosial, di mana individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik dan lebih mampu mengakses layanan kesehatan yang diperlukan (Zajacova dan Lawrence, 2018).

Selain itu, kemampuan kerja lulusan telah menjadi sorotan utama seiring dengan berkembangnya pendidikan tinggi dan perubahan di dunia kerja yang semakin menekankan nilai ekonomi serta manfaat lulusan universitas. Perubahan ini telah membawa sejumlah dampak, termasuk meningkatnya kendali pemerintah dan pengusaha terhadap kegiatan universitas, dengan tujuan yang lebih luas untuk memperbaiki hasil dan potensi kualitas sumber daya manusia di masa depan (Tomlinson 2012). Universitas kini menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menanggapi tuntutan pasar internal dan eksternal yang semakin kompleks, dengan mengubah cara pandang terhadap nilai dari aktivitas dan praktik mereka.

salah terkait kemampuan kerja dan keterampilan lulusan mungkin tidak nya disebabkan oleh kekurangan pada lulusan, melainkan oleh kelebihan



pasokan lulusan yang menurut pemberi kerja sulit untuk diakomodasi. Ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja berpendidikan tidak selalu sejalan dengan tingkat kesejahteraan. Kecenderungan para pemberi kerja untuk memilih jenis lulusan tertentu mencerminkan masalah mendalam yang muncul dari pendekatan yang lebih transaksional, berfokus pada biaya, dan berorientasi jangka pendek dalam pengembangan sumber daya manusia (Brown dan Hesketh, 2004). Oleh karena itu, keberhasilan integrasi lulusan ke dalam pasar kerja mungkin lebih bergantung pada bagaimana keterampilan mereka dimanfaatkan dan dikembangkan melalui partisipasi aktif di lingkungan kerja, daripada keterampilan yang mereka miliki sebelum memasuki pasar kerja.

Pendapatan per kapita suatu daerah sering kali digunakan pula sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah selain untuk membedakan pendapatan antar daerah. Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan pula corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemakmuran di berbagai daerah sering dibandingkan dengan menggunakan besaran pendapatan per kapita yang diperoleh pada rasio penghasilan negara/daerah dan jumlah penduduk daerah tersebut. Akan tetapi, pendapatan per kapita yang tinggi tidak menjamin kemakmuran penduduk. Sebab terdapat faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan (Iswara & Indrajaya, 2019).

Di samping itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah di Sulawesi Selatan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti asasi dan fasilitas kesehatan, menghalangi investasi dan pengembangan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja terdidik. Kebijakan ekonomi yang



tidak mendukung pengembangan sektor-sektor strategis juga berkontribusi pada masalah ini, di mana investasi yang rendah dalam industri yang berpotensi dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas menghambat penciptaan peluang bagi tenaga kerja terdidik. Dengan mengatasi masalah-masalah ini melalui peningkatan kualitas pendidikan, akses pelatihan, dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, Sulawesi Selatan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut ini disajikan gambar 1.1 yang dalam hal ini menunjukkan laporan PDRB perkapita untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2007-2024.

Tabel 1. 2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2024

Tahun	Pendapatan Masyarakat (Ribu Rupiah)
2007	23.263,51
2008	24.344,17
2009	25.877,60
2010	21.306,72
2011	22.769,27
2012	24.507,22
2013	26,087,08
2014	27.760,72
2015	29.427,30
SS2016	31.302,53
2017	33.243,64
2018	35.243,64
2019	37.340,12
2020	36.759,93
2021	37.501,45
2022	38.975,18
2023	40.290,12
2024	41.860,47

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat adanya tren peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, PDRB per kapita sebesar 23 juta Rupiah, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai lebih dari 41 juta Rupiah pada tahun 2024. Peningkatan PDRB per kapita yang konsisten dari tahun 2007 hingga proyeksi 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi yang dihasilkan per individu di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ini seringkali sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana keberadaan tenaga kerja yang terdidik memegang peran penting. Investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan dapat mendukung terciptanya tenaga kerja yang lebih kompeten dan produktif. Keberadaan tenaga kerja terdidik memungkinkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang bertambah maju dan bernilai tinggi, seperti industri pengolahan, teknologi informasi, dan sektor pariwisata. Sektor-sektor ini biasanya menawarkan upah yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang bergantung pada tenaga kerja dengan keterampilan rendah, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum.

Selain itu, dengan tenaga kerja terdidik juga berpotensi menarik investasi yang lebih besar, baik dari dalam maupun luar daerah. Perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dan terampil cenderung tertarik untuk berlokasi atau mengembangkan operasinya di wilayah dengan sumber daya manusia yang memadai. Investasi ini berpotensi menciptakan peluang kerja berkualitas dengan tingkat upah yang kompetitif, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan PDRB per kapita. Tak kalah



... tenaga kerja terdidik juga memiliki potensi lebih besar untuk berinovasi
... ciptakan usaha baru. Kewirausahaan yang didukung oleh pengetahuan

dan keterampilan dapat menghasilkan produk serta layanan inovatif, membuka peluang ekonomi baru, dan secara luas meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi pendapatan per kapita di Sulawesi Selatan dapat dikatakan cukup baik, dengan tren pertumbuhan yang stabil dan pemulihan yang cepat dari gangguan ekonomi. Meskipun pendapatan per kapita di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahun, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tantangan besar. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketimpangan pendapatan yang signifikan. Kenaikan pendapatan per kapita sering kali tidak merata, di mana kelompok kecil, terutama yang bekerja di sektor formal dan industri, memperoleh manfaat yang lebih besar, sementara mayoritas masyarakat, khususnya yang bergelut di sektor informal dan pertanian, tidak merasakan dampak positif yang sebanding. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar, sehingga meskipun angka rata-rata pendapatan meningkat, masih banyak individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi sulit.

Selain itu, meskipun pendapatan mengalami peningkatan, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tetap menjadi permasalahan yang serius. Banyak masyarakat masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kurangnya akses ini menghambat mereka dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas, sehingga sulit bagi mereka untuk berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Selain itu, berbagai faktor



lainnya infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, serta terbatasnya kerja di daerah pedesaan turut memperburuk kondisi ini.

Peningkatan pendapatan per kapita yang tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang efektif dan program pemberdayaan masyarakat dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pertumbuhan tersebut. Ini termasuk investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan dapat meningkat secara merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Kesejahteraan memberikan peran lebih penting kepada pembuat kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Suryono (2014), dalam (Hatta, Djuanda et, al 2022). Oleh karena itu, penyediaan layanan dasar bertujuan untuk memastikan kesejahteraan yang optimal. Kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yang dijamin melalui alokasi pendapatan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan jaminan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Determinan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah



dasarkan latar belakang maslah sebagaimana telah diuraikan di atas,
an disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah belanja modal pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan serta dapat juga menjadi salah satu sarana untuk mendalami dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan menjadi referensi yang berguna untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya prodi Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan serta sebagai bahan pertandingan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu khususnya tentang Analisis Determinan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebagai bahan masukan bagi Lembaga terkait dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tenaga Kerja Terdidik

Teori Sumber Daya Manusia (*Human Capital Theory*) menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan tenaga kerja yang terdidik sebagai faktor utama untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan pendidikan dan pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang selanjutnya berdampak pada pendapatan dan kualitas hidup individu. Human capital, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan atribut individu, merupakan pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Mereka mengidentifikasi bahwa pengembangan human capital tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik terhadap human capital dapat memperkuat dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Eker dan Ilmola-Sheppard Eker & Ilmola-Sheppard (2020)

Tenaga kerja terdidik menurut konsep Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pengangguran 2001 - 2006 didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun dan lebih yang bekerja serta telah menamatkan pendidikan tingkat atas (SLTA) dan yang setara, atau yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi (perguruan tinggi/universitas). Tenaga kerja

ik umumnya ditandai dengan pendidikan lanjutan, memiliki pengetahuan keterampilan untuk melakukan pekerjaan yang rumit, kemampuan dalam adaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, serta penerapan



keaktivitas terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dalam pekerjaan, Salsabila dan Budiasih (2021).

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Sedangkan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa, Hubert Marpaung (2010).

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang baik dalam bidang tertentu, karena telah menyelesaikan pendidikan formal dan non-formal yang relevan dengan bidang tersebut. Mereka biasanya memiliki keahlian khusus dan pemahaman yang lebih mumpuni dalam bidang yang mereka geluti, serta memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tren terbaru di bidang tersebut (Puspasari, 2019), dalam Widya Ustani et, al (2023). Tenaga kerja terdidik sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara karena mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada industri dan sektor-sektor tertentu, serta membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan. Mereka juga cenderung memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan kesempatan untuk mengembangkan karir yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja non-terdidik. Widya Ustani S. et, al (2023). Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memfasilitasi pendidikan yang berkualitas dan

lanjutan bagi masyarakat agar dapat menghasilkan tenaga kerja terdidik berkualitas. Selain itu, perusahaan dan organisasi juga dapat



memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawannya untuk meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan kinerja perusahaan.

2.1.2. Pendapatan Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan diartikan sebagai hasil dari usaha dan sebagainya. Pendapatan seseorang juga dapat dideskripsikan sebagai jumlah penerimaan yang diukur dengan satuan mata uang, yang dapat diperoleh oleh individu maupun bangsa dalam suatu periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan bahwa “pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh dalam periode tertentu.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh anggota masyarakat selama periode tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Pendapatan masyarakat mencakup penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu maupun kelompok rumah tangga dalam satu bulan, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Adam Smith, dalam bukunya *The Wealth of Nations*, mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat adalah total dari hasil pekerjaan produktif yang dihasilkan oleh masyarakat. Pendapatan masyarakat mencerminkan kemampuan ekonomi suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk kebutuhan masyarakat. Dalam

anggannya pendapatan masyarakat adalah hasil dari tingkat produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat produktivitas suatu



negara, maka akan cenderung berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan rata-rata individu.

2.1.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah bagian dari belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan investasi. Pengeluaran ini memiliki manfaat jangka panjang, yaitu lebih dari satu tahun anggaran, dan berkontribusi pada penambahan aset pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Selanjutnya belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Banga (2017).

Belanja modal berkaitan erat dengan istilah investasi. Kata investasi dapat diartikan bermacam-macam, tergantung dari konteks mengartikannya Halim (2008). Dalam bahasa akuntansi, pada konteks belanja investasi dapat timbul dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Ketika membahas belanja modal, maka istilah yang digunakan adalah *capital expenditure* karena dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sularso dan Restiant (2012).

Belanja modal merujuk pada investasi yang dilakukan oleh pemerintah 1 bentuk pengadaan atau pembelian aset yang memiliki masa manfaat dari satu tahun. Aset tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan rintahan, memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta meningkatkan



kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Halim (2008:4-5), dalam Endy G.T (2019). Dengan demikian, belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi warganya dengan menyediakan pelayanan dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh pada pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan ekonomi melalui penyediaan pelayanan dasar akan sangat memengaruhi kualitas *human capital* di masa yang akan datang. Dalam teori modal manusia (*Human Capital*), asumsi yang digunakan adalah bahwa pendidikan formal adalah faktor utama atau pendorong yang menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Mongan, J.J.S (2019).

1) Belanja Modal Bidang Pendidikan

Belanja fungsi pendidikan menurut PMK 84 Tahun 2009 adalah alokasi anggaran dalam APBD yang ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Ini mencakup gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran untuk pendidikan kedinasan. Penggunaan total belanja sebagai input sering diterapkan dalam berbagai penelitian di bidang pendidikan, terutama pada studi tentang biaya pendidikan yang dilakukan di Indonesia, seperti yang diteliti oleh Lewis dan Pattinasarany (2011).



Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan

atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah. Asumsi yang digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan.

Investasi penting bagi manusia salah satunya pendidikan yang dianggap sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dimasa mendatang. Tingkat Pendidikan yang tinggi tidak akan langsung bisa dirasakan hasilnya, melainkan dapat dirasakan dalam jangka waktu lama Astriana (2012). Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan yang tinggi memiliki manfaat lebih besar, dari seseorang dengan pendidikan yang relatif rendah. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk donesia secara merata.



Implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas Setiawan (2006). Kaitannya dengan perekonomian secara umum semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

2) Belanja Modal Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2006).

Di sisi lain, peningkatan produktivitas bergantung pada kesehatan, karena produktivitas pendidikan dipengaruhi oleh kesehatan yang baik. Anggaran pemerintah memungkinkan pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan publik baik secara sarana maupun prasarana. Dengan adanya anggaran, sektor kesehatan diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang memadai, berkualitas tinggi, dan terjangkau bagi masyarakat dan tenaga kerja (Pakaya et al., 2023).



Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan

lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

2.1.4. Tingkat Inflasi

Stabilitas harga sangat penting bagi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpendapatan tetap dan sektor usaha. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Sukirno (2011) inflasi adalah keadaan di mana harga-harga mengalami kenaikan terus-menerus, yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan berdampak pada ekonomi suatu negara.



Menurut teori keynes, inflasi terjadi ketika masyarakat berusaha untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menciptakan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan bagian dana yang lebih besar dari yang dapat disediakan. Hal ini menyebabkan kesenjangan inflasi yang berdampak pada kenaikan biaya. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh pemerintah yang menerapkan defisit anggaran melalui pencetakan uang baru, serta oleh pengusaha swasta yang ingin berinvestasi dan mendapatkan pembiayaan dari kredit bank, serta buruh yang meminta kenaikan gaji.

Terdapat dua penyebab utama inflasi, yaitu *Demand Pull Inflation* dan *Cost Push Inflation*. *Demand Pull Inflation* terjadi akibat adanya permintaan yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi, Putong (2013). Berdasarkan hukum permintaan, jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, akan menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan kapasitas produksi, seperti menambah tenaga kerja. Di sisi lain, *Cost Push Inflation* muncul karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh meningkatnya biaya faktor produksi. Akibat dari kenaikan biaya produksi, produsen akan menaikkan harga produk meskipun jumlah penawaran tetap, atau harga produk meningkat akibat penurunan jumlah produksi.

2.1.5. Keterbukaan Perdagangan

Teori keunggulan komparatif David Ricardo yang memaparkan barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif akan diproduksi dan diekspor negara dan sebaliknya negara akan melakukan impor pada barang-barang yang biaya produksi yang lebih mahal (Mankiw, 2007).



Perekonomian negara yang melakukan aktivitas atau hubungan ekonomi dengan negara lain disebut sebagai perekonomian terbuka. Negara dengan perekonomian terbuka melakukan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa serta meminjam atau memberikan pinjaman pada pasar modal dunia. Keterbukaan perdagangan membuat setiap negara di dunia berlomba-lomba dalam memajukan perekonomian mereka. Mankiw (2007). Perekonomian terbuka mencakup ekspor dan impor barang dan jasa antara negara serta peminjaman dan pemberian pinjaman di pasar keuangan global (Mankiw, 2007). Keterbukaan ekonomi memungkinkan setiap negara untuk investasi di negara lain, mendapatkan pinjaman dalam bentuk barang, jasa, dan keuangan dari negara lain, dan melakukan kerjasama perdagangan dalam bentuk ekspor barang yang didukung oleh sumber daya yang melimpah. (Kharazi & Nuraini, 2024).

Keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi berhubungan erat serta memiliki keterkaitan satu sama lain, Purnomo dan Mudakir (2020),. Keterbukaan perdagangan merupakan proses mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan berupa pengurangan atau penghilangan tarif, penghapusan yang bertujuan untuk memperbesar kuota impor, penghapusan nilai tukar, dan penghapusan persyaratan izin administratif untuk impor. Hal ini menjadi tekanan sekaligus menjadi harapan kepada setiap negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan melakukan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain (Ichvani dan Sasana, 2019).



2.2. Hubungan antar Variabel

2.2.1. Hubungan Tenaga Kerja Terdidik dengan Pendapatan Masyarakat

Hubungan antara tenaga kerja terdidik dan pendapatan masyarakat juga mencerminkan pentingnya investasi dalam pendidikan. Ketika pemerintah dan sektor swasta berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, mereka tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terdidik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam berbagai sektor ekonomi.

Pendidikan memberikan individu keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara produktif dalam dunia kerja. Dengan keterampilan yang lebih tinggi, tenaga kerja terdidik cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi, yang secara langsung meningkatkan pendapatan mereka dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi tenaga kerja adalah langkah penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2. Hubungan Belanja Modal Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan Pendapatan Masyarakat



Belanja modal pemerintah umumnya ditujukan untuk pembangunan struktur dan fasilitas yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas tan ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan belanja modal pemerintah membutuhkan tenaga kerja, sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan menurun, lebih banyak orang akan bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Hendarmin, 2012).

Teori pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa belanja modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan keterampilan tenaga kerja berperan dalam menaikkan pendapatan masyarakat. Selain itu, teori kesejahteraan menyoroti bahwa alokasi sumber daya untuk layanan sosial dapat langsung memperbaiki kualitas hidup individu. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal di sektor kesehatan dan pendidikan berdampak positif pada indikator kesejahteraan, seperti pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM). Dengan demikian, belanja modal yang dilakukan secara efektif dapat menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3. Hubungan Tingkat Inflasi dengan Pendapatan Masyarakat

Tingkat inflasi memiliki hubungan yang erat dengan pendapatan masyarakat. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Ketika inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok dan barang lainnya naik, sedangkan pendapatan masyarakat yang tetap atau tidak

tingkat seiring kenaikan harga menyebabkan daya beli masyarakat turun, (Sinaga et al, 2025). Hal ini berarti meskipun pendapatan nominal kin tidak berubah, secara riil kemampuan masyarakat untuk membeli



barang dan jasa menjadi berkurang, sehingga kesejahteraan mereka menurun.

Inflasi yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dan kenaikan harga tersebut dapat meluas ke harga barang dan jasa lainnya, sedangkan pendapatan masyarakat tetap, hal tersebut akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, (Sari, C.N.P, et, al 2019). Oleh karena itu, hubungan antara tingkat inflasi dan pendapatan masyarakat sangat penting dalam menentukan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial, di mana pengendalian inflasi diperlukan agar pendapatan masyarakat tidak terkikis oleh kenaikan harga barang dan jasa.

Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya secara ekonomis. Apabila terjadi perubahan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, masing-masing kelompok menginginkan bagian yang lebih besar dari pada kelompok yang lain. Proses perebutan ini menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Dan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya berarti tidak terpenuhi kesejahteraannya

Teori ekonomi klasik menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan.

n konteks ini, inflasi dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan



pendapatan, karena individu dengan pendapatan tetap atau rendah sulit menyesuaikan pengeluarannya seiring kenaikan harga.

Di sisi lain, inflasi moderat yang terkendali dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan investasi. Namun, jika inflasi tidak dikelola dengan baik, seperti pada negara-negara yang mengalami hiperinflasi, hal ini dapat menyebabkan krisis ekonomi yang serius dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.4. Hubungan Keterbukaan Perdagangan terhadap Pendapatan Masyarakat

Keterbukaan perdagangan berhubungan erat dengan pendapatan masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi. Dengan meningkatnya keterbukaan perdagangan, negara atau wilayah semakin aktif dalam perdagangan internasional, yang dapat meningkatkan investasi asing langsung (FDI) dan memperluas pangsa pasar. Hal ini biasanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, Eri Kuntoro et al, (2020). Sehingga, daerah-daerah yang mampu memanfaatkan peluang ini dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efek ini tidak selalu merata di seluruh wilayah, sehingga penting untuk memperhatikan



mana kebijakan perdagangan dapat dirancang untuk memastikan bahwa manfaat dari keterbukaan perdagangan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Keterbukaan perdagangan dapat menjadi alat yang efektif untuk

meningkatkan kesejahteraan, asalkan diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Keterbukaan perdagangan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesejahteraan suatu negara, karena memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar internasional. dengan meningkatnya akses terhadap pasar internasional, negara-negara ASEAN dapat memperluas ekspor dan impor, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. (Rahmi N & Bagio Mudakir, 2017). Ketersediaan barang dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari keterbukaan perdagangan dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, keterbukaan perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.5. Hubungan Belanja Modal Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan Tenaga Kerja Terdidik

Peningkatan belanja modal di sektor pendidikan dan kesehatan telah menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dalam membangun modal manusia yang berkualitas, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Alokasi anggaran untuk pendidikan, seperti



angunan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan pengembangan ilmu, terbukti meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terdidik. Dengan as pendidikan yang lebih baik, lebih banyak individu dapat mengakses

pendidikan berkualitas, menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, sehingga lebih siap memasuki pasar kerja. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga berkontribusi pada inovasi dan pengembangan teknologi.

Di sisi lain, investasi dalam sektor kesehatan, yang mencakup pembangunan fasilitas kesehatan dan program-program kesehatan masyarakat, berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Perbaikan status gizi dan penurunan angka kesakitan berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja, karena tenaga kerja yang sehat cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih rendah dan mampu bekerja dengan lebih efisien. Sinergi antara pendidikan dan kesehatan menciptakan individu yang tidak hanya terdidik, tetapi juga sehat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, investasi yang seimbang dalam kedua sektor ini adalah langkah strategis yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

2.2.6. Hubungan Tingkat Inflasi dengan Tenaga Kerja Terdidik

Tingkat inflasi memiliki hubungan yang kompleks dengan tenaga kerja terdidik, yang dapat mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran di pasar tenaga kerja. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun, yang dapat mengakibatkan penurunan konsumsi dan investasi. Hal



dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar kerja, sehingga perusahaan mungkin enggan untuk merekrut atau mempertahankan tenaga kerja terdidik. Inflasi yang tinggi dapat

mendorong perusahaan untuk meningkatkan upah guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil, terutama jika keterampilan tersebut sangat dibutuhkan. Namun, jika upah tidak sejalan dengan inflasi, tenaga kerja terdidik mungkin merasa tertekan secara finansial, yang dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas mereka.

Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melanjutkan pendidikan, karena biaya pendidikan yang meningkat dapat menjadi penghalang bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian, hubungan antara tingkat inflasi dan tenaga kerja terdidik mencerminkan interaksi yang rumit antara kondisi ekonomi, kebijakan upah, dan akses terhadap pendidikan, yang semuanya berkontribusi pada dinamika pasar tenaga kerja.

2.2.7. Hubungan Keterbukaan Perdagangan dengan Tenaga Kerja Terdidik

Hubungan antara keterbukaan perdagangan dan tenaga kerja terdidik dapat dilihat dari perspektif skala daerah, di mana interaksi antar daerah dapat mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Ketika suatu daerah membuka diri terhadap perdagangan dengan daerah lain, baik domestik maupun internasional, ia dapat menarik investasi dan menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi tenaga kerja terdidik. Misalnya, daerah yang memiliki akses ke pelabuhan atau infrastruktur transportasi yang baik cenderung lebih mampu menarik perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih luas.



Keterbukaan perdagangan dapat mendorong kolaborasi antara daerah, dan daerah yang lebih maju dalam pendidikan dan pelatihan dapat berbagi

pengetahuan dan sumber daya dengan daerah yang kurang berkembang. Namun, perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan antara daerah dapat menciptakan ketimpangan, di mana daerah yang memiliki tenaga kerja terdidik yang lebih baik akan lebih mampu bersaing dan menarik investasi, sementara daerah lain mungkin tertinggal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, agar semua daerah dapat memanfaatkan manfaat dari keterbukaan perdagangan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja mereka.

2.3. Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Y.T dan Kumalasari A., (2021) tentang, “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Per Kapita” Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita.

Regina Niken Wilantari (2021) dalam penelitiannya berjudul “Peran Pendidikan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan Teori Absolute Income dan Teori Investasi Modal Manusia” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dengan indikator pertumbuhan PDB dan konsumsi di Indonesia.

Hasibuan Doli Syahputra (2025) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional: Bukti Empiris Tahun 2014-2024” hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap



pendapatan nasional, dengan kontribusi yang sangat kuat. Sebaliknya, inflasi juga memengaruhi pendapatan nasional, meskipun tidak sekuat pengaruh pajak. Persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan pajak akan meningkatkan pendapatan nasional, sementara inflasi juga memberikan dampak positif.

Dedi Julianto dan Puti Annisa Utari (2018) dalam penelitiannya berjudul “Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Individu di Sumatera Barat” hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan individu, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan juga akan meningkat.

Nasiona dan Jufrin La Eha (2024) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana” hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (90%) hasil peninjauan menunjukkan adanya korelasi positif pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wiranto, Basri Bado & Syamsu Alam dalam penelitiannya berjudul “Analisis Determinan Kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan” hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan secara simultan variabel pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sultan, Heffi C.R & Purwiyanta dalam penelitiannya berjudul “Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” hasil

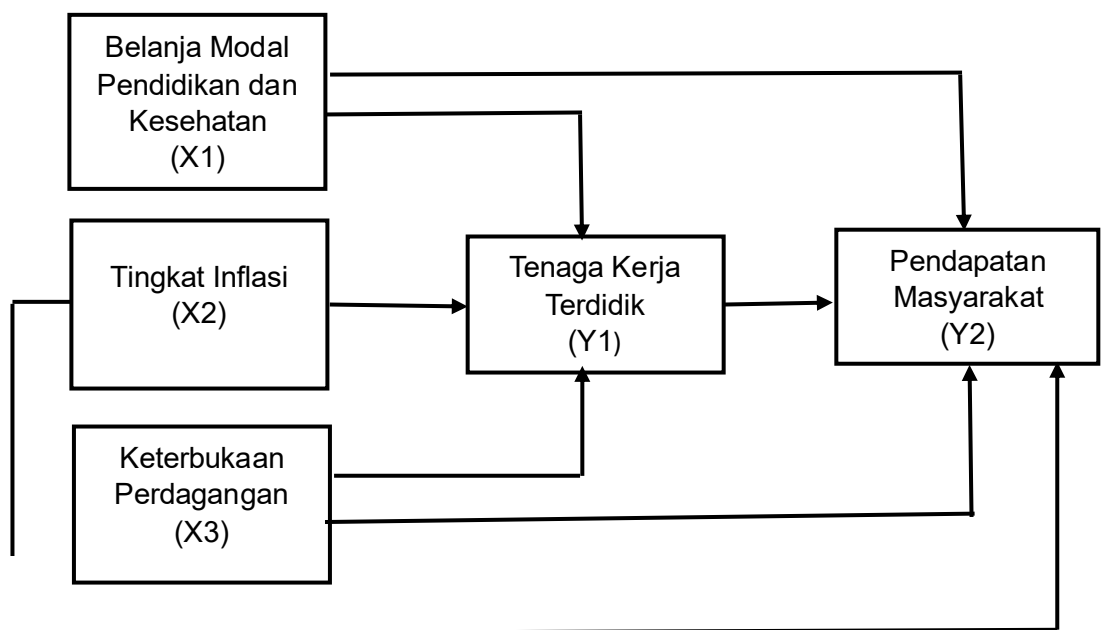
menunjukkan bahwa dari hasil analisis tersebut lolos uji asumsi klasik, artinya residual bersifat normal, tidak terdapat masalah autokorelasi,



heteroskedastisitas, dan multikolinearitas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti diuraikan dengan kajian teori diatas. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat dampak pendapatan perkapita pada tenaga kerja terdidik. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel independennya adalah belanja modal pendidikan dan kesehatan, tingkat inflasi, tenaga kerja terdidik, dan keterbukaan perdagangan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi variabel dependen yakni tingkat kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kerangka pemikiran penelitian berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga belanja modal pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik.
2. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik.
3. Diduga keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja terdidik.

